

DAFTAR ISI

SURAT KETERANGAN PENGANTI LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
INTISARI	ix
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	31
C. Tujuan Penelitian.....	31
1. Tujuan Subjektif.....	31
2. Tujuan Objektif	32
D. Kegunaan/Manfaat Penelitian	33
E. Keaslian Penelitian.....	36
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	54
A. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan (Wewenang)	54
1. Pengertian Kewenangan (Wewenang)	54
2. Sumber Kewenangan Pemerintah (Cara Memperoleh Wewenang Pemerintahan).....	62
3. Sifat Wewenang Pemerintahan	71
4. Pembatasan dalam Pelaksanaan Wewenang	72
5. Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang dan/atau Menyalahgunakan Kewenangan yang Berkualitas sebagai Maladministrasi	73
6. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Bidang Perizinan.....	81
7. Pelimpahan Kewenangan Perizinan di Daerah Kabupaten Jember	89
B. Tinjauan Umum Tentang Perizinan	96
1. Pengertian Perizinan.....	97

2. Unsur-unsur Perizinan.....	106
3. Bentuk dan Isi Perizinan	107
4. Sifat Perizinan	108
5. Proses dan Prosedur Perizinan	110
6. Persyaratan Perizinan	112
7. Fungsi Perizinan.....	114
8. Tujuan Perizinan	116
9. Aspek Yuridis Perizinan.....	118
10. Elemen Pokok Perizinan	119
11. Syarat-Syarat Penerbitan Izin (Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Perizinan)	125
12. Keabsahan Wewenang Tindakan Penyelenggaraan Perizinan.....	131
C. Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Perizinan Terpadu.....	133
1. Pengertian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).....	133
2. Sejarah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).....	136
3. Tujuan, Sasaran, Prinsip dan Ruang Lingkup Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).....	143
D. Tinjauan Umum Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	146
1. Pengertian <i>Good Governance</i>	146
2. Sejarah <i>Good Governance</i> di Indonesia.....	154
3. Konsep Dasar <i>Good Governance</i>	156
4. Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i>	162
5. Pelaksanaan <i>Good Governance</i> di Indonesia	167
6. Kaitan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bidang Perizinan oleh Pemerintah Daerah.....	168
BAB III METODE PENELITIAN	173
A. Jenis dan Sifat Penelitian	173
B. Bahan Penelitian	176
1. Jenis Data	176
2. Sumber Data.....	177

C. Cara Pengumpulan Data	180
1. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Primer	181
2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Sekunder	181
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Tersier	182
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Bahan Non-Hukum	182
D. Analisis Data Hasil Penelitian	182
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	185
A. Pengaturan Pelimpahan (Pendelegasian) Kewenangan Perizinan oleh Bupati Kabupaten Jember kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jember	185
1. Pengaturan Pelimpahan (Pendelegasian) Kewenangan Perizinan di Indonesia	188
2. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jember	270
B. Konsekuensi (Akibat) Hukum Sebelum dan Sesudah Adanya Pendelegasian Kewenangan Perizinan oleh Bupati kepada DPMPTSP dalam Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Jember	276
1. Konsekuensi (Akibat) Hukum Sebelum Ditandatangani SK Bupati Jember Nomor 188.45/77/1.12/2021 Tentang Pemberian Pendelegasian Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Jember kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Jember dalam Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Jember	276
2. Konsekuensi (Akibat) Hukum Sesudah Ditandatangani SK Bupati Jember Nomor 188.45/77/1.12/2021 Tentang Pemberian Pendelegasian Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Jember kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Jember dalam Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Jember	354
BAB V PENUTUP.....	380
A. Kesimpulan	380
B. Saran	385
DAFTAR PUSTAKA.....	388